

Politik Dalam Persepsi Ulama Kota Palangka Raya

Hakim Syah

Jurusan Dakwah dan Komunikasi IAIN Palangka Raya

Election is manifestation of democracy as stated in constitution. In election, ulama has played a role urgently as opinion leader to direct moslem in voting the candidate. This research aims to know and to describe ulama perception of politic especially Palangka Raya election 2013. The result of research is that ulama has diversity perception on politic and democracy. Their perception is based on attitude, motive, interest, experience, and expectation

Keywords: perception, ulama, politic

Penyelenggaraan pemilu merupakan wujud sistem demokrasi sebagaimana menjadi amanat konstitusi. Dalam setiap pemilu, posisi ulama masih dipandang penting dan strategis sebagai opinion leader yang diharapkan mampu mendulang suara secara signifikan bagi para kandidat. Tidak mengherankan jika dalam setiap hajatan demokrasi para kandidat melakukan sowan politik kepada ulama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan perspektif ulama tentang politik dalam konteks pemilukada Kota Palangka Raya tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama di Kota Palangka Raya berpandangan beragam tentang politik dan demokrasi. Pandangan mereka didasarkan atas sikap, motif, ketertarikan, pengalaman, dan harapan

Kata kunci: persepsi, ulama, politik

Penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara dalam praktiknya membutuhkan sebuah sistem politik. Setiap negara pada dasarnya memiliki sistem politiknya sendiri dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Salah satu sistem politik yang banyak dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara adalah sistem demokrasi. Sistem demokrasi dianggap sebagai sistem politik yang terbaik dibandingkan dengan sistem politik yang lainnya.

Bangsa Indonesia telah bersepakat menjadikan demokrasi sebagai sistem bernegara. Salah satu wujud demokrasi adalah pelaksanaan pemilu atau pemilukada. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu selalu memberi ruang persinggungan antara agama dan politik, meskipun keduanya seringkali diposisikan secara diametral. Dalam konteks politik Indonesia, agama seringkali dijadikan modal politik bagi para pemburu kekuasaan (*power seekers*). Realitas politik Islam pun tampil dalam kehidupan politik di Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh hadirnya partai politik berideologi agama.

Potret sejarah kelahiran bangsa ini tampaknya sarat dengan tampilnya agama dalam ruang politik. Agama tidak sekadar diposisikan secara sakral dengan segala ritualistik simbolik di dalamnya, namun juga diorientasikan kepada “nafas” kehidupan berpolitik di Indonesia. Agama dengan demikian menjadi variabel penting yang memengaruhi kehidupan politik di Indonesia.

Email penulis: syah.hakim@yahoo.com

Dalam konteks pemilukada, eksistensi ulama nampaknya masih menjadi “magnet” tersendiri bagi para politisi untuk memperoleh restu sehingga tidak jarang banyak para kandidat pemilukada sengaja melakukan “sowan politik” kepada para ulama. Secara praktis di kalangan umat Islam sendiri kata ulama memiliki beragam sebutan sesuai dengan kultur umat Islam di masing-masing daerah. Kyai (Jawa), Bendhara (Madura), Ajengan (Sunda), Syeikh (Sumatera Utara/Tapanuli), Tuan Guru (Nusa Tenggara dan Kalimantan), dan Tengku (Aceh) (Effendi, 1991).

Dalam *Ensiklopedi Indonesia*, kata ulama, sebagaimana dikutip oleh Dawam Rahardjo, adalah mereka yang memiliki ciri-ciri sebagai pengemban tradisi agama, sebagai pelaksana hukum fiqh, dan orang yang paham pengetahuan hukum Islam (Rahardjo, 1999, 195).

Bagi para kandidat, restu ulama diyakini menjadi salah satu instrumen atau modal politik yang penting untuk merealisasikan “ambisi politik”nya. Dalam studi komunikasi politik, ulama bisa diposisikan sebagai *opinion leader* yang bisa memengaruhi sikap dan perilaku pemilih. Kondisi demikian juga diduga kuat terjadi dalam pemilukada yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya tahun 2013.

Pada pemilukada Tahun 2013, KPUD Kota Palangka Raya telah menetapkan 6 (enam) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota. Dari enam pasangan calon, tiga pasangan merupakan pasangan sesama muslim. Jumlah pasangan calon dalam pemilukada tahun 2013 lebih banyak daripada pemilukada tahun 2008. Menariknya, pemilukada Kota Palangka Raya tahun 2013 juga diikuti oleh dua pasangan dari jalur independen dimana satu diantaranya adalah perempuan.

Para pasangan calon secara aktif dan intens terus mendekati para ulama untuk memperoleh restu. Pasangan calon sengaja datang dan silaturahmi ke para ulama demi memperoleh legitimasi politik. Pada titik inilah ulama seringkali justru terjebak pada kepentingan praktis dan pragmatisme politik.

Sampai saat ini umat Islam masih berpandangan kuat bahwa keterlibatan ulama dalam dunia politik praktis merupakan hal tabu dan semestinya dihindari sebisa mungkin. Ulama semestinya tetap berkhidmat sebagai penjaga moral, bukan sebaliknya menceburkan dirinya ke dalam dunia politik praktis.

Potret politik umat Islam memang tidak pernah menampilkan wajah tunggal. Perbedaan kepentingan dan ideologi diyakini menjadi faktor penyebab mengapa umat Islam tidak bisa tampil dengan wajah Islam politik yang tunggal. Pada sisi lain, keterlibatan ulama dalam politik praktis sesungguhnya juga merupakan bukan hal baru. Sejarah politik Islam Nusantara telah menampilkan bagaimana hubungan ulama dan umara memiliki dinamikanya sendiri.

Palangka Raya merupakan kota yang secara demografis berpenduduk heterogen baik etnik, bahasa, budaya maupun agama, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam.

Tabel 1
Penduduk Kota Palangka Raya Berdasarkan Agama

No	Penganut Agama	Jumlah
1	Islam	231.323
2	Kristen	91.215
3	Katolik	6.227
4	Hindu	5.294
5	Budha	586
6	Konghucu	18
7	Kepercayaan	2.001

Sumber: Database SIAK Dinas Dukcapil Pemkot Palangka Raya Tahun 2013

Pluralistik penduduk kota Palangka Raya secara filosofis dibalut dengan kearifan lokal *Huma Betang*. Pluralistik kehidupan penduduk Palangka Raya merupakan potensi dan modal sosial yang penting dalam mendorong proses pembangunan.

Sebagai ibukota provinsi, suksesi kepemimpinan di Kota Palangka Raya menjadi barometer politik bagi kabupaten lain di wilayah propinsi dengan julukan “Bumi Tambun Bungai” ini. Suksesi kepemimpinan sesungguhnya tidak hanya sekadar dilihat sebagai proses demokrasi prosedural, namun diakui atau tidak juga melibatkan sentimen agama di dalamnya.

Dalam pelaksanaan demokrasi melalui pemilu, agama pun menjadi variabel penting yang memengaruhi sikap dan perilaku pemilih. Pada konteks inilah eksistensi dan peran ulama masih dipandang penting untuk memberikan *moral force* sebagai bentuk legitimasi politik para pemburu kekuasaan. Suka atau tidak suka, faktanya dalam setiap momentum suksesi kepemimpinan daerah melalui pemilu, ulama justru terlibat atau dilibatkan secara langsung atau pun tidak langsung.

Para ulama dan kiai yang sebelumnya konsisten dan sibuk mengurus "dalam negeri" pesantren dan umat tiba-tiba menjadi selebriti politik. Ormas Islam, ulama, dan kiai banyak yang tergoda ikut merebut posisi, diperebutkan, bahkan terkadang tampak terseret untuk memasuki gelanggang pertarungan politik yang lebih luas. Mereka berpolitik dan men-cemplungkan diri dalam dunia yang penuh manuver dan intrik.

Secara teoritik, persepsi merupakan aktivitas yang *integrated*, maka seluruh apa yang ada pada individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan, dan aspek-aspek lain akan ikut berperan dalam persepsi tersebut (Walgito,2004,54). Dengan demikian penelitian tentang persepsi individu merupakan hal yang menarik karena bisa mengungkap persepsi seseorang dengan kemampuan melihat persoalan secara kritis, namun juga dipengaruhi oleh perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan, dan aspek-aspek lain dalam diri seseorang tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang pandangan atau persepsi ulama di Kota Palangka Raya terhadap politik (baca: pemilu/kada). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosial-keagamaan (teo-sosiologis). Pendekatan sosial keagamaan ini dipandang sebagai pendekatan yang tepat karena eksistensi dan peran ulama tidak bisa lepas dari konteks sosiologis. Sumber data penelitian ini mencakup sumber primer, yakni ulama di Kota Palangka Raya yang ditentukan berdasarkan *purposive sampling* (Sugiyono, 2010, 54).

Sementara itu, sumber data sekunder, yaitu sejumlah literatur dan dokumen tertulis lainnya yang relevan dengan topik riset. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui (1) wawancara mendalam (*depth-interview*). Wawancara dilakukan kepada subjek sebagai *key informan* secara mendalam dengan maksud dapat menggali data berupa informasi dan pandangan ulama Kota Palangka Raya tentang politik dan data yang tersembunyi pada informan dapat terungkap, (2) penelusuran pustaka dan dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data tertulis terkait topik riset.

Penelitian ini dalam analisis datanya adalah dengan menggunakan analisis fenomenologis, yaitu analisis yang menggambarkan kondisi sejelas-jelasnya dari kondisi yang ada di lapangan. Dalam analisis fenomenologis, data dikelompokkan ke dalam klasifikasi-klasifikasi tertentu menurut perspektif komunitas yang diteliti sebagai *folk domain* mereka (*emic*). *Folk domain* ini kemudian dipetakan ke dalam *folk taxonomy*. Dengan *folk taxonomy* itu dapat diketahui sistem pengetahuan mereka tentang politik.

Temuan dan Bahasan

Pada bagian ini dipaparkan hasil temuan dan bahasan tentang persepsi para ulama di Kota Palangka Raya terhadap politik. Julia T. Wood mendefinisikan bahwa persepsi adalah suatu proses aktif yang mencakup penyeleksian, pengorganisasian, dan penginterpretasian atau pemaknaan mengenai orang, objek, kejadian situasi dan kreatifitas (Wood, 1997, 45). Jadi persepsi pada dasarnya adalah pola respon seseorang tentang sesuatu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kesiapan, tujuan, kebutuhan, pengetahuan, pengalaman, dan faktor lingkungannya.

Politik merupakan bidang kehidupan manusia yang memiliki cakupan luas, tidak sekadar berbicara tentang kekuasaan. Dalam kehidupan manusia, politik menjadi bagian penting yang mewarnai dan menyertai perilaku manusia. Pada umumnya orang berpandangan antara agama dan politik merupakan dua hal yang berlawanan dan tidak dapat disatukan. Politik dipandang sebagai produk sekuler, sedangkan agama merupakan sesuatu yang profan.

Ulama atau kiai dan sebutan sejenis lainnya dianggap sebagai figur penting dalam memengaruhi kehidupan politik. Ada beberapa isu penting terkait politik yang

menjadi pandangan sejumlah ulama atau kiai di Kota Palangka Raya. Isu-isu politik dimaksud, antara lain:

Sistem Demokrasi dan Kepemimpinan Perempuan

Sistem demokrasi seolah sudah menjadi hal penting yang harus diterapkan dalam sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia sebagai sebuah negara yang notabene berpenduduk mayoritas muslim dianggap sebagai salah satu negara yang telah menerapkan sistem demokrasi yang baik. Demokrasi dipilih karena diyakini menjadi sistem yang paling ideal dalam konteks penyelenggaraan kehidupan politik sebuah negara.

Perdebatan tentang hubungan Islam dan demokrasi pun sampai saat ini masih menjadi diskursus tersendiri di kalangan umat Islam. Pandangan bahwa demokrasi merupakan produk Barat dan tidak sesuai dengan Islam masih mewarnai pandangan sebagian kelompok umat Islam. Bahkan secara masif dilakukan agregasi wacana dan gerakan yang menolak demokrasi sebagai pilihan sistem bernegara.

Terkait hubungan Islam dan demokrasi, ulama Kota Palangka Raya memiliki pandangannya sendiri. Menurut Stephen P. Robbin, persepsi seseorang sebenarnya dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti faktor yang berada dalam diri yang mempersepsi (*perceiver*) berupa *attitude*, *motive*, *interest*, *experience*, dan *expectation* (Pujaatmaka dan Molan, 2006, 73).

Tabel 2
Persepsi Ulama tentang Demokrasi dan Kepemimpinan Perempuan

No	Informan Kunci	Persepsi
1	KH. Ahmadi Isa (wawancara 10 Nov 2013)	<ul style="list-style-type: none"> - Demokrasi merupakan produk pemikiran Barat dan tidak sesuai dengan Islam. Islam hanya mengenal <i>syura</i> (musyawarah) - Sepanjang masih ada laki-laki yang baik dan berkualitas maka tidak semestinya perempuan menampilkan dirinya dalam suksesi kepemimpinan. Soal kepemimpinan, al-Quran secara jelas dan tegas menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dalam konteks kehidupan. "Sesuatu yang <i>qath'i</i> itu tidak bisa ditafsirkan secara <i>bi-ar rayi</i>
2	KH. Busro Chalid (wawancara 10 Nov 2013)	<ul style="list-style-type: none"> - Demokrasi itu merupakan pilihan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Suka atau tidak suka, demokrasi ya akan terus berjalan dan Islam hanya menjadi rambu moralitas di dalam menyelenggarakan demokrasi - Agama memberikan batasan yang jelas bahwa laki-laki adalah pemimpin, tidak hanya di rumah tangga. Sepanjang masih

		ada laki-laki, semestinya laki-laki lah yang musti menjadi pemimpin
3	KH. Anwar Isa (wawancara 16 Des 2013)	<ul style="list-style-type: none"> - Pada dasarnya demokrasi itu telah diatur dalam Islam. Al-Quran dan as-Sunnah telah memberikan panduan tentang berdemokrasi. Oleh karena itu, demokrasi itu semestinya merujuk kepada kedua sumber tersebut - Perempuan pada dasarnya juga punya hak untuk dipilih menjadi seorang pemimpin sepanjang perempuan itu memang cakap dan berakhlak mulia
4	KH. Chairudin Halim (wawancara 16 Des 2013)	<ul style="list-style-type: none"> - Islam dan demokrasi sebenarnya tidak berhubungan sama sekali. Sebab demokrasi itu produk politik, produk manusia, sedangkan agama itu produk Tuhan - Dalam memilih seorang pemimpin khususnya di bidang pemerintahan semestinya yang dipilih adalah laki-laki. Sebab kalau perempuan yang dipilih dikhawatirkan akan mendatangkan kerugian
5	KH. Muhsin (wawancara 12 Nov 2013)	<ul style="list-style-type: none"> - Demokrasi itu merupakan prinsip yang menjaga dan mengangkat harkat dan martabat manusia. Penting digarisbawahi bahwa 2/3 kandungan atau isi al-Qur'an itu berbicara tentang <i>hablumminannas</i> (hubungan sesama manusia). Jadi sebenarnya antara Islam dan demokrasi itu tidak bertentangan - Agama pada dasarnya tidak melarang perempuan untuk menjadi pemimpin sepanjang perempuan mampu menjaga hak-hak dan kewajibannya. Dengan kata lain, perempuan menjadi pemimpin sebenarnya diperbolehkan.
6	H. Ghazali Rahman (wawancara 12 Nov 2013)	<ul style="list-style-type: none"> - Demokrasi sebenarnya bertentangan dengan ajaran Islam. Demokrasi itu hanya menekankan pada kebebasan. Kebebasan itu sering kali justru menzalimi orang lain. Sementara, Islam itu mengajarkan untuk tidak menzalimi orang lain atau orang yang dipimpinnya. - Demokrasi yang memberi ruang bagi tampilnya perempuan dalam suksesi kepemimpinan bukanlah produk Islam. Apapun alasannya, perempuan tidak dibenarkan maju untuk tampil sebagai pemimpin sebuah negara

7	H. M. Al Ghifari (wawancara 12 Nov 2013)	<ul style="list-style-type: none"> - Demokrasi memang bukan produk agama. Agama hanya menjadi rambu moralitas agar demokrasi bisa berjalan dengan baik - Siapapun tanpa membedakan jenis kelamin pada dasarnya berhak dicalonkan dan dipilih tanpa harus terjebak oleh pandangan sempit apalagi dengan mempolitisasi ajaran agama
---	---	---

Tabel 2 menunjukkan bahwa pandangan sejumlah ulama Kota Palangka Raya seputar hubungan antara Islam dan demokrasi ternyata beragam. Keberagaman pandangan mereka dilatarbelakangi oleh sikap, pengetahuan dan pengalamannya masing-masing. Beberapa ulama berpandangan bahwa demokrasi merupakan sistem politik yang sebenarnya tidak ada hubungan secara langsung dengan Islam. Salah seorang ulama, KH. Ahmadi Isa, mengemukakan: “Demokrasi merupakan produk pemikiran Barat dan tidak sesuai dengan Islam. Harus diingat, Islam hanya mengenal *syura* (musyawarah)”.

Sementara itu, sejumlah ulama lain berpandangan demokrasi tidak berlawanan dengan Islam. Secara prinsip demokrasi sebenarnya juga menghargai nilai-nilai agama seperti kesetaraan. Hanya saja dalam praktiknya, demokrasi justru kebablasan tanpa mengindahkan etika dan moral. Konsekuensinya, demokrasi hanya mendatangkan atau menghadirkan kemafsadatan ketimbang kemaslahatan. Menurut mereka, demokrasi semestinya menjunjung tinggi nilai-nilai dan ajaran agama, bukan justru mereduksinya melalui praktik kehidupan sosial yang destruktif dan tidak manusiawi.

Posisi diametral antara agama dan demokrasi memang selamanya tidak akan menemui titik temu manakala paradigma yang ditonjolkan dalam beragama melalui paradigma legal-formal. Legalitas dan formalitas beragama berarti menempatkan agama sebagai “kendaraan politik”. Padahal, pengalaman sejarah menunjukkan bahwa politisasi agama selalu membawa kepada distorsi atas agama itu sendiri.

Islam pada dasarnya menaruh perhatian yang serius terhadap aplikasi kristalisasi nilai-nilai demokrasi. Misalnya, prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjadi pilar demokrasi juga tercermin dari lima prinsip universal (*kulliyatul khams*) yang menjadi tujuan *syara'*, yakni menjamin kebebasan beragama (*hifdz al-din*), memelihara nyawa (*hifdz al-nafs*), menjaga keturunan dan profesi (*hifdz al-nasl wal-'irdl*), menjamin kebebasan berekspresi dan berserikat (*hifdz al-'aql*) dan memelihara harta benda (*hifdz al-mal*).

Bisa dikatakan bahwa *mainstream* pola ketatanegaraan qur'ani sebenarnya lebih cenderung kepada sistem demokrasi, jika ditilik dari sistem kenegaraan yang berkembang saat ini. Ketidak-*sharih*-an al-qur'an dalam mengangkat persoalan bentuk negara, justru memberikan peluang kepada umat Islam untuk berkreasi, sungguh pun dalam kondisi plural yang sarat dengan hal-hal kontradiktif.

Proses demokratisasi sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari upaya pembumian nilai-nilai agama. Hakikat demokrasi merupakan aktualisasi

interpretasi yang benar atas nilai-nilai pokok agama. Pemberdayaan atas nilai-nilai demokratisasi sama halnya dengan pengukuhan relasi manusia dengan Tuhan.

Sistem politik demokrasi diperlukan terutama bagi Indonesia, karena Indonesia membutuhkan suatu perangkat sistem yang dapat mengoreksi jalannya proses pemerintahan dan penggunaan kekuasaan melalui kontrol dari publik dengan berlandaskan atas ketentuan-ketentuan konstitusional.

Nurcholis Majid menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi, tingkat pendidikan yang meningkat dan stabilitas politik yang telah dicapai oleh Indonesia berkonsekuensi logis pada pentingnya keterbukaan dan partisipasi politik yang lebih luas di tingkat publik, yang mana hal itu dapat direalisasikan apabila Indonesia mengambil dan mengembangkan demokrasi sebagai suatu pilihan sistem bernegara.

Komitmen umat Islam terhadap ide demokrasi adalah menjadi suatu keharusan. Komitmen umat Islam terhadap demokrasi tidak saja karena secara prinsipil normatif ide tentang demokrasi itu sendiri sesuai (*compatible*) dengan nilai-nilai universal ajaran Islam, namun lebih dari itu demokrasi secara fungsional merupakan sistem dengan aturan yang terbuka (Pribadi dan Haryono, 2002, 295).

Hubungan antara agama dan demokrasi sebenarnya adalah hubungan yang kompleks dan rumit, di mana relasi di antara keduanya tidaklah begitu saja bersifat saling mendukung satu sama lain. Dalam hal ini, Abdurrahman Wahid menunjukkan bahwa apabila ditelusuri lebih jauh, ada perbedaan nilai yang bersifat fundamental antara agama dan demokrasi.

Demokrasi berprinsip pada kesetaraan di antara seluruh warga negara tanpa memandang perbedaan agama maupun keyakinan, jenis kelamin, etnik, dan lain-lainnya. Sementara agama justru berprinsip pada pembedaan terutama atas dasar keyakinan maupun agama. Sehingga menurut Abdurrahman Wahid, apabila agama ingin memberi peran di dalam pembentukan masyarakat demokratis, maka agama sudah seharusnya melakukan transformasi ke dalam terlebih dulu (Wahid, 1999, 191).

Apabila agama berhasil melakukan transformasi di dalam dirinya dengan memberikan pemaknaan baru terhadap hubungannya dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan kemanusiaan sehingga mampu menjalankan tugasnya secara universal, maka agama berhasil menjalankan fungsi pembebasan (*liberatif*) dan berperan di dalam penciptaan masyarakat demokratis.

Salah satu isu krusial dalam demokrasi yang sampai saat ini masih juga belum menemukan kesepakatan bulat di kalangan ulama dan umat Islam dalam konteks suksesi kepemimpinan adalah soal perempuan yang terlibat dalam suksesi kepemimpinan melalui pemilu atau pilukada. Isu perempuan masih menjadi isu "sexy" setiap kali hajatan demokrasi. Pilukada Kota Palangka Raya tahun 2013 yang juga memunculkan kandidat dari kalangan kaum hawa menarik untuk diikuti, terutama bagaimana sebenarnya pandangan atau persepsi para ulama terhadap hal itu. Sejumlah ulama Kota Palangka Raya pun ternyata memiliki pandangan yang beragam soal kepemimpinan perempuan.

Kebanyakan ulama di Kota Palangka Raya yang menjadi subjek penelitian berpandangan bahwa Islam pada dasarnya tidak mengenal istilah kepemimpinan perempuan. Hal ini misalnya dikemukakan KH. Ahmadi Isa:

“Sepanjang masih ada laki-laki yang baik dan berkualitas maka tidak semestinya perempuan menampilkan dirinya dalam suksesi kepemimpinan. Soal kepemimpinan, al-Quran secara jelas dan tegas menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dalam konteks kehidupan. “Sesuatu yang *qath’i* itu tidak bisa ditafsirkan secara *bi-ar rayi*.”

Kebanyakan ulama atau kiai tersebut tampaknya menyandarkan pandangannya pada firman Allah SWT QS. An-Nisa: 34 dan hadist nabi yang berbunyi *lan-yufliha qaumun wallau amra-hum imra’atan* yang berarti tidak akan bahagia kaum yang menyerahkan urusannya (memilih/mengangkat pemimpin) seorang perempuan.

Benarkah dalam Islam perempuan diharamkan menjadi pemimpin?. Secara historis, menurut Imam Abul Hasan Ali ibn Ahmad Al-Wahidi (w. 468 H) *asbabun nuzul* ayat tersebut bermula dari kisah Sa’ad ibn Rabi’, seorang pembesar golongan Anshor. Diriwayatkan bahwa istrinya (Habibah bintu Zaid ibn Abi Hurairah) telah berbuat *nusyuz* lalu ia ditampar oleh Sa’ad. Peristiwa keluarga ini berbuntut dengan pengaduan Habibah kepada Nabi saw. Nabi saw kemudian memutuskan untuk meng*qishash* terhadap Sa’ad, namun begitu Habibah beserta ayahnya mengayunkan beberapa langkah untuk melaksanakan *qishash*, Nabi saw memanggil keduanya lagi, seraya mengkabarkan ayat yang baru turun melalui Jibril, “*ar-rijaalu qawwamuuna ‘alan-nisa’*, karenanya *qishash* pun dibatalkan (Siradj, 1999, 7).

Dari sini, dapat dipahami bahwa pemakaian ayat tersebut untuk mengharamkan kepemimpinan perempuan di luar urusan “domestik” jelas memiliki validitas argumentasi yang sangat lemah. Perlu digarisbawahi pula bahwa ayat tersebut juga bukan berupa kalimat instruksi (*amar*), namun hanya *khabariah* (berita), sehingga akurasi hukum wajib atau haram memiliki kadar yang kurang efektif. QS. An-Nisa: 34 tersebut sering kali hanya digunakan untuk mencekal lawan politik atau dengan kata lain politisasi ayat-ayat Tuhan. Hal ini juga dikemukakan oleh salah seorang ulama, H.M. Alghifari, yang menjadi subjek penelitian. Ia mengemukakan:

“Soal kepemimpinan perempuan memang sensitif. Seringkali al-Quran dipolitisasi untuk kepentingan politik tertentu oleh kelompok tertentu. Dan tentu ini sangat tidak dibenarkan. Janganlah hanya untuk kepentingan politik tertentu agama diperjualbelikan. Siapapun pada dasarnya berhak dicalonkan dan dipilih tanpa harus terjebak oleh pandangan sempit apalagi dengan mempolitisasi ajaran agama”.

Hadits sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, “*lan-yufliha qaumun wallau amra-hum imra’atan*” jika ditelusuri *asbabul wurudil hadits* (sebab-sebab munculnya hadits) menurut Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-‘Asqalani (w. 852 H) dalam karyanya *Fathul Bari*, hadits tersebut bermula dari kisah Abdullah ibn Hudzafah, kurir Rasulullah saw yang menyampaikan surat ajakan masuk Islam kepada Kisro

Anusyirwan, penguasa Persia yang beragama Majusi. Ternyata ajakan tersebut ditanggapi sinis dengan merobek-robek surat yang dikirimkan Nabi saw.

Dari laporan tersebut Nabi saw memiliki firasat bahwa Imperium Persia kelak akan terpecah belah sebagaimana Anusyirwan merobek-robek surat. Tidak berapa lama, firasat itu terjadi hingga akhirnya kerajaan tersebut dipimpin puteri Kisro yang bernama Buran. Mendengar realitas negeri Persia yang dipimpin perempuan, Nabi saw mengomentari: “*lan-yufliha qaumun wallau amrahum imra’atan.*”

Komentar nabi ini sangat argumentatif karena kapabilitas Buran yang lemah di bidang kepemimpinan. Obyek pembicaraan Nabi bukanlah kepada seluruh perempuan, akan tetapi hanya tertuju kepada Ratu Buran, puteri Anusyirwan yang kredibilitas kepemimpinannya sangat diragukan. Terlebih di tengah percaturan politik Timur Tengah saat itu yang rawan peperangan antarsuku.

Dari aspek substansi *nash*, hadits tersebut juga bukan berupa kalimat larangan (*nahiy*), tetapi hanya *khabarlah* (berita). Oleh karena itu, hukum haram (larangan) pun tidak memiliki signifikansi yang akurat. Tidak berlebihan jika kemudian Ibn Jarir Al-Thabari menandakan bahwa pemimpin perempuan bukanlah *mani'* (penghalang) dalam hukum Islam.

Pendapat ini kemudian dikuatkan pula oleh sebagian ulama Malikiyyah dalam memberikan legitimasi Ratu Syajaratud-Dur di Mesir. Realitas semacam ini sebenarnya semakin melunturkan larangan perempuan untuk tampil sebagai seorang pemimpin.

Partai Politik, Politik Uang, dan Golput

Kehidupan demokrasi di Indonesia terus bergerak dinamis. Demokrasi meniscayakan kehadiran partai politik. Sampai saat ini kehadiran partai politik menjadi syarat mutlak bagi sistem demokrasi yang dianut sebuah negara. Fase sejarah Republik ini pun diwarnai dengan wajah partai politik yang beragam mulai dari agamis sampai nasionalis. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa demokrasi telah menjadi pasar bebas partai politik (Heryanto, 2011, 10).

Fenomena berdirinya partai-partai politik baru, termasuk di dalamnya partai politik dengan ideologi agama (Islam), bisa dicermati sebagai sebuah upaya mencari terobosan dan mencairkan kebekuan terhadap aspirasi umat Islam. Kehadiran partai politik Islam untuk sebagian bisa menjadi harapan, meskipun realitas empiris menunjukkan partai politik Islam bukanlah satu-satunya tumpuan aspirasi umat Islam.

Sayangnya, Islam politik yang direpresentasikan melalui kehadiran partai politik “berbaju” agama pada kenyataannya justru kurang diminati oleh umat Islam sendiri yang notabene merupakan mayoritas penduduk negeri ini. Setiap pagelaran politik melalui pemilu di Indonesia, partai politik Islam justru tidak pernah tampil sebagai pemenang.

Meskipun Islam menjadi agama mayoritas, di kalangan umat Islam sendiri terdapat perbedaan pendapat menyangkut keyakinan Islam sebagai sebuah ideologi. Tidak semua kalangan Islam menerima keyakinan Islam sebagai ideologi politik

praktis. Hal ini ditunjukkan oleh perilaku politik dan pemilih Islam terhadap preferensi partai politik yang sangat beragam.

Setidaknya terdapat dua kelompok yang berbeda dalam hal ini. *Pertama*, mereka yang percaya bahwa Islam menyediakan visi politik sekaligus memiliki pengalaman politik yang bisa direkonstruksikan dalam keyakinan ideologi yang representatif tanpa meminjam ideologi lain. *Kedua*, mereka yang meyakini Islam bukanlah ideologi alternatif. Islam lebih merupakan sumber ide yang memiliki wawasan politik dan orientasi politik kontekstual dan konstruktif serta inklusif yang menekankan manifestasi substansial nilai-nilai keislaman serta penampilan pada simbol-simbol politik yang terbuka dan diterima oleh semua pihak.

Perjuangan untuk mewujudkan nilai-nilai dan moral Islam tidak hanya dicari dalam tubuh partai politik Islam semata, tetapi juga harus dicari dalam partai-partai lain, karena partai politik Islam tidak bisa mengklaim atau mewakili semua aspirasi umat Islam.

Bagi partai politik Islam, ulama atau kiai masih dipercaya menjadi ikon dan mesin pendulang suara melalui kharisma yang dimilikinya. Terkait kehadiran partai politik Islam, para ulama di Kota Palangka Raya pun memiliki pandangannya masing-masing.

Tabel 3
Persepsi Ulama tentang Partai Politik, Politik Uang, dan Golput

No	Informan Kunci	Persepsi
1	KH. Ahmadi Isa (wawancara 10 Nov 2013)	<ul style="list-style-type: none"> - Semestinya kehadiran partai politik Islam bisa menjadi sarana perjuangan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Namun pada kenyataannya jauh panggang dari api. Idealnya antara ormas Islam dan partai politik Islam memiliki kesamaan tujuan - <i>Money politic</i> memang sangat potensial terjadi dalam setiap penyelenggaraan pemilu atau pemilukada. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak bersikap kritis dan cenderung mengedepankan kepentingan perutnya ketimbang mengedepankan kejujuran dalam berpolitik. Agama secara tegas menghukumi bahwa <i>money politic</i> itu haram - Menggunakan hak pilih dengan baik merupakan bagian dari ibadah karena itu berarti turut berpartisipasi dalam suksesi kepemimpinan sepanjang yang dipilihnya adalah pasangan muslim. Kalau tidak menggunakan hak pilihnya itu berarti sama saja yang bersangkutan tidak turut memperjuangkan kepentingan Islam dan umat Islam
2	KH. Busro Chalid (wawancara 10 Nov 2013)	- Kehadiran partai politik Islam itu baik sebab kehadirannya adalah untuk

		<p>memperjuangkan kepentingan umat Islam dan idealnya umat Islam semestinya cukup memiliki satu partai saja yang mewadahi aspirasinya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Secara jujur harus diakui bahwa praktik <i>money politic</i> masih sering kali terjadi dalam setiap kali penyelenggaraan pemilu atau pemilukada. Praktik <i>money politic</i> sulit dihindari karena masyarakat juga tidak mau dibodohi - Setiap warga negara itu diberikan hak politik. Semestinya hak politiknya digunakan dengan sebaik-baiknya. Memilih pemimpin itu merupakan bagian dari ibadah yang memiliki nilai pahala dalam agama. Umat Islam semestinya menggunakan hak pilihnya, jangan sampai golput. Golput justru akan merugikan umat Islam sendiri
3	KH. Anwar Isa (wawancara 16 Des 2013)	<ul style="list-style-type: none"> - Kehadiran partai politik Islam sebenarnya sangat bagus untuk umat Islam jika mereka berpihak kepada kepentingan dan kesejahteraan umat. - <i>Money politic</i> yang sering terjadi dalam setiap pemilu atau pemilukada bertentangan dengan ajaran agama. <i>Money politic</i> hanya menyebabkan kehancuran dan tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat - Dalam demokrasi itu ada hak politik, yakni hak memilih dan hak dipilih. Golput dalam setiap pemilu atau pemilukada pada dasarnya juga merupakan hak setiap warga negara atau individu. Golput bisa terjadi karena masyarakat sudah apatis atau kehilangan kepercayaan. Sikap golput yang diambil juga perlu mempertimbangkan apakah pasangan calon akan merugikan agama atau tidak
4	KH. Chairudin Halim (wawancara 16 Des 2013)	<ul style="list-style-type: none"> - Demokrasi memang memberikan ruang dan kesempatan bagi lahirnya partai politik Islam. Dan hal ini semestinya bisa dijadikan alat perjuangan umat. Kehadiran partai politik Islam jangan sampai sekadar menjadi alat memenuhi kepentingan pribadi atau golongan tertentu saja - Politik uang dalam pandangan agama jelas diharamkan karena diibaratkan seperti suap - Fenomena golput dalam setiap pemilu atau pemilukada memang sulit untuk dihindari. Tindakan golput justru hanya akan

		merugikan umat Islam sendiri, apalagi kalau calon pemimpinnya muslim. Memilih itu sebenarnya merupakan wujud tanggung jawab kepada agama dan negara.
5	KH. Muhsin (wawancara 12 Nov 2013)	<p>- Partai politik Islam sebenarnya bagus dalam rangka memperjuangkan kepentingan umat Islam. Namun, pada kenyataannya parpol-parpol Islam masih belum mampu menjadikan dirinya sebagai alat perjuangan politik umat Islam sebagaimana yang diharapkan</p> <p>- <i>Money politic</i> bagaimanapun jelas bertentangan dengan ajaran agama. Memberikan uang kepada pemilih agar seseorang terpilih sama halnya tidak memberikan pendidikan politik yang baik. Oleh karena itu, apapun alasannya <i>money politic</i> menurut ajaran agama itu diharamkan</p> <p>- Golput sebenarnya juga melihat situasi dan kondisi. Jika golput sebagai sikap politik yang diambil tidak membahayakan atau menggoyahkan pemerintahan suatu daerah maka tidak menjadi masalah, namun jika golput justru membahayakan atau menggoyahkan pemerintahan maka sebaiknya tidak dibolehkan. Sebagai warga negara yang baik, semestinya juga menggunakan hak politiknya dengan baik. Memilih pemimpin yang baik dan berakhlakul karimah merupakan bagian dari ajaran agama</p>
6	H. Ghazali Rahman (wawancara 12 Nov 2013)	<p>- Kehadiran parpol-parpol Islam sudah sangat bagus dalam rangka mewakili suara-suara masyarakat Islam di Indonesia, namun pada saat ini oknum-oknum di parpol-parpol Islam tersebut masih banyak yang bekerja tidak sesuai al-Quran dan As-Sunnah</p> <p>- <i>Money politic</i> terjadi disebabkan oleh oknum tertentu dan masyarakat masih belum cerdas dalam memilih, bahkan masih tergiur dengan tawaran-tawaran uang.</p> <p>- Golput tidak dibenarkan karena dengan tidak memilih umat Islam malah merugi dan yang diuntungkan malah pasangan non-muslim. Memilih pasangan muslim merupakan bagian dari memperjuangkan kepentingan Islam dan umat Islam</p>
7	H.M. Al Ghifari (wawancara 12 Nov 2013)	- Kepentingan umat Islam memang harus terus diperjuangkan melalui sarana politik. Oleh karena itu, kehadiran parpol-parpol

		<p>Islam sebenarnya penting dan baik sepanjang parpol-parpol Islam bekerja sesuai visi dan misinya. Terlalu banyak parpol berideologi Islam juga sebenarnya tidak terlalu menguntungkan bagi umat Islam sendiri karena suaranya terpecah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Praktik <i>money politic</i> dalam proses pemilihan pemimpin itu jelas tidak dibenarkan. Agama Islam secara jelas dan tegas mengharamkan praktik <i>money politic</i> - Golput sesuatu yang tidak pas. <i>Hubbul wathan minal iman</i>. Cinta negara bagian dari iman. Paling tidak di antara para calon ada yang lebih baik. Kalau kita bingung dalam memilih pemimpin bisa dengan istikharah. Kita berharap pemimpin kita bisa melakukan perubahan
--	--	---

Politik sesungguhnya merupakan bagian integral dari kehidupan manusia. Manusia hidup sesungguhnya tidak bisa lepas dari praktik berpolitik. Wajah perilaku politik pun bermacam-macam. Salah satu yang sampai saat ini masih menjadi warna kental dalam dunia politik di Indonesia adalah praktik atau perilaku politik transaksional.

Politik transaksional didominasi oleh praktik politik uang (*money politic*) yang berlangsung setiap kali penyelenggaraan pemilu atau pemilukada. Praktik *money politic* pun dilakukan baik secara samar maupun terang-terangan dengan dalih yang diciptakan sedemikian rupa. Praktik politik uang dipandang tidak mencerminkan pendidikan politik yang baik. Hal ini dinyatakan oleh salah seorang ulama, KH. Muhsin.

“*Money politic* bagaimanapun jelas bertentangan dengan ajaran agama. Memberikan uang kepada pemilih agar seseorang terpilih sama halnya tidak memberikan pendidikan politik yang baik. Oleh karena itu, apapun alasannya *money politic* menurut ajaran agama itu diharamkan”.

Perilaku politik yang secara umum juga muncul dalam setiap hajatan demokrasi melalui pemilu atau pemilukada adalah kurangnya antusias warga untuk memberikan suaranya ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan bahkan cenderung banyak tidak mau menggunakan hak pilihnya (baca: golput). Mencermati fenomena golput dalam pemilu atau pemilukada, salah seorang ulama, KH. Anwar Isa, berpandangan:

“Dalam demokrasi itu ada hak politik, yakni hak memilih dan hak dipilih. Golput dalam setiap pemilu atau pemilukada pada dasarnya juga merupakan hak setiap warga negara atau individu. Golput bisa terjadi karena masyarakat sudah apatis atau kehilangan kepercayaan. Sikap golput yang diambil juga perlu mempertimbangkan apakah pasangan calon akan merugikan agama atau tidak”.

Politik uang dan Golput dalam pandangan ulama Kota Palangka Raya merupakan hal yang bertentangan dengan ajaran Islam dan justru hanya akan merugikan umat Islam sendiri. Umat Islam semestinya cerdas dalam berpolitik bukan malah gampang untuk dibodohi. Praktik-praktik politik yang kotor sesungguhnya justru tidak akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, menurut para ulama di kota Palangka Raya, umat Islam dalam berpolitik harus senantiasa mengedepankan dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

Politik menjadi baik karena dikelola oleh orang yang baik, sebaliknya politik itu menjadi kotor pun karena orang yang mengelolanya juga kotor. Agama dan politik akan terus berinteraksi dalam perjalanan kehidupan umat manusia. Agama menjadi kontrol moral agar politik bisa dipraktikkan dengan menjunjung tinggi keadaban.

Keterlibatan/peran ulama dalam politik praktis

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa di setiap hajatan demokrasi melalui pemilu atau pilukada, ulama selalu hadir dan bahkan tampil secara nyata dalam panggung politik praktis. Ulama di Kota Palangka Raya pun memiliki pandangan tersendiri terhadap fenomena tersebut.

Tabel 4

Persepsi ulama terhadap Kiprahnya dalam Politik Praktis

No	Informan Kunci	Persepsi
1	KH. Ahmadi Isa (wawancara 10 Nov 2013)	Bagaimanapun ulama memang harus terlibat dalam politik untuk memperjuangkan kepentingan Islam dan umat Islam. Ini juga bentuk tanggung jawab ulama kepada umat
2	KH. Busyro Chalid (wawancara 10 Nov 2013)	Ulama atau kiai itu perannya dalam politik seperti pilukada sebenarnya hanya sebatas penyeru moral kepada umat agar memilih pemimpin yang baik dan berakhlak mulia. Benar bahwa para kandidat sering kali datang atau silaturahmi untuk meminta restu dan tidak ada yang salah atau keliru jika kandidat meminta restu kepada ulama atau kiai.
3	KH. Anwar Isa (wawancara 16 Des 2013)	Peran ulama dalam politik praktis sebenarnya pilihan individu dan tidak bisa dipaksakan. Kalaupun ulama berpolitik itu dimaksudkan untuk memperjuangkan kepentingan Islam dan umat Islam
4	KH. Chairudin Halim (wawancara 16 Des 2013)	Ulama atau kiai perannya dalam pilukada idealnya sebatas memberikan saran atau himbauan kepada umat untuk memilih pemimpin yang baik dan amanah. Kalau misalnya, ada ulama atau kiai terlibat politik secara praktis, itu pilihan pribadi. Ulama atau kiai ya semestinya bersikap netral dan independen. Jangan

		sampai ulama atau kiai terlalu jauh terlibat dalam dunia politik praktis
5	KH. Muhsin (wawancara 12 Nov 2013)	Dalam politik seperti pemilu, setiap kandidat berusaha mendekati ulama. Kedudukan ulama masih dipandang penting untuk mendulang suara pemilih. Tidak mengherankan dalam praktiknya, ada ulama atau kiai yang terlibat sebagai tim sukses kandidat tertentu. Menurut saya secara pribadi, idealnya ulama atau kiai semestinya bersikap netral atau independen sebab ulama atau kiai itu kan harus menjadi panutan umat
6	H. Ghazali Rahman (wawancara 12 Nov 2013)	Islam pada dasarnya memandang politik sebagai hal yang baik dalam kehidupan manusia. Bagaimana Islam bisa berkembang sampai saat ini sesungguhnya juga tidak lepas dari strategi politik. Nabi sendiri selain sebagai pemimpin agama, beliau juga sebagai seorang negarawan. Hal ini tidak bisa dibantah karena sejarah telah membuktikan hal itu. Jadi seorang ulama atau kiai juga tidak harus menjauhkan dirinya dari dunia politik
7	H.M. Al Ghifari (wawancara 12 Nov 2013)	Kalau mau jujur bahwa keterlibatan ulama dalam politik seperti pemilu atau pemilu hanya akan menyebabkan umat terpecah dan hubungan antarulama sering kali juga menjadi renggang karena perbedaan sikap dan pandangan politik. Jadi ulama atau kiai memang idealnya menjauhkan diri dari politik praktis. Urusan politik ya diserahkan kepada para politisi.

Sejumlah ulama di Kota Palangka Raya berpandangan bahwa ulama sebenarnya perlu terlibat dalam politik dan tidak bisa menjauh sama sekali dari dunia politik. Alasannya, keterlibatan dalam politik diyakini sebagai bentuk perjuangan bagi kepentingan Islam dan umat Islam. Salah seorang ulama, H. Ghazali Rahman, mengemukakan:

“Islam pada dasarnya memandang politik sebagai hal yang baik dalam kehidupan manusia. Bagaimana Islam bisa berkembang sampai saat ini sesungguhnya juga tidak lepas dari strategi politik. Nabi sendiri selain sebagai pemimpin agama, beliau juga sebagai seorang negarawan. Hal ini tidak bisa dibantah karena sejarah telah membuktikan hal itu. Jadi seorang ulama atau kiai juga tidak harus menjauhkan dirinya dari dunia politik”.

Pandangan berbeda justru dikemukakan oleh ulama lainnya. Secara tegas ia tidak setuju jika ulama terlibat dalam politik praktis. Alasannya, hal itu justru

menyebabkan ketidakharmonisan di kalangan ulama sendiri dan juga di kalangan umat Islam sendiri. H.M. Alghifari berpendapat:

“Kalau mau jujur bahwa keterlibatan ulama dalam politik seperti pemilu atau pemilukada hanya akan menyebabkan umat terpecah dan hubungan antarulama sering kali juga menjadi renggang karena perbedaan sikap dan pandangan politik. Jadi ulama atau kiai memang idealnya menjauhkan diri dari politik praktis. Urusan politik ya diserahkan kepada para politisi”.

Dari Tabel 4 tergambar secara jelas bahwa sebagian ulama berpandangan keterlibatan atau peran ulama dalam politik praktis merupakan hal yang wajar dan tidak berlebihan karena sebenarnya itu merupakan bentuk tanggung jawab kepada umat. Terlibat atau pun tidak terlibat dalam politik praktis bagi ulama hanyalah sebuah pilihan individu yang tentu saja tidak akan pernah bisa disamakan atau disatukan.

Simpulan

Secara umum ulama di Kota Palangka Raya berpandangan bahwa berpolitik harus menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Agama dan politik meskipun dua hal yang bertolak belakang, namun masing-masing saling memengaruhi. Agama bisa berkembang juga karena politik, politik menjadi baik dan santun juga dipengaruhi oleh agama. Ulama Kota Palangka Raya berpandangan bahwa demokrasi bukan pilihan ideal dalam penyelenggaraan negara karena demokrasi yang diterapkan cenderung banyak membawa mudarat ketimbang masalah bagi rakyat.

Kepemimpinan perempuan pun masih dipandang tabu sebab secara eksplisit dan tegas, Islam tidak mengenal kepemimpinan perempuan. Idealnya kaum laki-lakilah yang menjadi pemimpin meskipun demokrasi telah memberikan ruang bagi munculnya pemimpin dari kalangan perempuan. *Money politic* dan *Golput* merupakan praktik politik yang tidak dibenarkan dalam Islam. Keduanya justru merusak dan merugikan kepentingan umat Islam sendiri. Keterlibatan ulama dalam politik merupakan keniscayaan dan pilihan bebas dari individu ulama.

Referensi

- Effendi, Djohan. 1991. *Ulama dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid XVII. Jakarta: Cipta Adi Pustaka.
- Hidayat, Komarudin dan Haryono, Yudhie. 2004. *Manuver Politik Ulama*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Heryanto, Gun Gun. 2011. *Dinamika Komunikasi Politik*. Jakarta: Lasswell Visitama.
- Madjid, Nurcholish. 1999. *Dialog Keterbukaan: Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial-Politik Kontemporer*. Jakarta: Paramadina.
- Pribadi, Airlangga dan R. Haryono, M. Yudhie. 2002. *Post Islam Liberal, Membangun Dentuman, Mentradisikan Eksperimentasi*. Bekasi: Gugus Press.

- Rahardjo, M. Dawam. 1999. *Intelektual Inteligencia dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiawan Muslim*. Bandung: Mizan.
- Robbin, Stephen P. 2006. *Organization Theory: Structure, Design, and Applications*, (Penj. Hadyana Pujaatmaka dan Benyamin Molan). Jakarta: Prenhallindo.
- Siradj, Said Aqiel. 1999. *Islam Kebangsaan*. Jakarta: Pustaka Ciganjur.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cetakan VI. Bandung: Alfabeta.
- Wahid, Abdurrahman. 1999. *Mengurai Hubungan antara Agama dan Negara*. Jakarta: Grassindo.
- Walgito, Bimo. 2004. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi.
- Wood, Julia T. 1997. *Communication in our Lives*. Washington: Wadsworth Publishing Company.